

**DINAMIKA KEHIDUPAN TAHANAN POLITIK PULAU BURU
(1965-1970)**

JURNAL



oleh :
Andrean Eka Setiawan
09406241011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**DINAMIKA KEHIDUPAN TAHANAN POLITIK PULAU BURU
(1965-1970)**

oleh:

Andrean Eka Setiawan

ekaaconk7@gmail.com

Pembimbing:

Dra. Rr. Terry Irenewaty, M. Pd.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar belakang sosial, dan ideologi tapol di Pulau Buru (2) mengetahui kehidupan tapol selama di Pulau Buru pada tahun 1969-1979 (3) menganalisis dampak psikologi dan sosial terhadap tapol Pulau Buru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dengan empat tahapan, yaitu pengumpulan sumber (*heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), interpretasi, dan penulisan karya sejarah (*historiografi*) dengan pendekatan sosial dan psikologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Setelah peristiwa 30 september 1965, masyarakat yang dianggap simpatisan dan pernah ikut dalam organisasi berbau PKI ditangkap dan ditahan dan ditempatkan di penjara khusus bagi tahanan politik di berbagai daerah. (2) Tahanan politik yang sebagian besar golongan B disebar di pulau Buru, secara berkala dan di bawah pengawasan dari tentara, mereka bekerja merubah pulau Buru dari hutan menjadi lahan pertanian sekaligus tempat tinggal hingga membentuk lingkungan sosial lengkap dengan fasilitasnya. (3) Mereka dihadapkan pada sebuah keadaan dimana kebebasan yang terbatas, jauh dari sanak saudara, dan dipaksa terus bekerja, selain akibat fisik yang dialami, hal tersebut memberikan beban mental yang cukup berat bagi para tapol, akibatnya sebagian tapol cenderung memiliki sifat tertutup dan pendiam. Tapol pulau Buru yang semuanya laki-laki, juga memberikan dampak tersendiri pada perilaku seksual mereka.

Kata kunci: Tahanan Politik, Pulau Buru 1965-1970.

Pendahuluan

Peristiwa 30 september 1965 merupakan catatan sejarah Indonesia yang masih meninggalkan berbagai pertanyaan dan kontroversi yang belum terjawab hingga saat ini. Elemen-elemen yang dianggap pro-PKI mengalami pembersihan dengan cara pemberentian dan pemutusan kerja/tugas.¹ Di bawah kendali Soeharto sebagai panglima tertinggi dalam tubuh militer Indonesia, tentara menjadi kekuatan dominan dalam panggung politik, menggantikan pengaruh-pengaruh politik Soekarno yang telah menyusut kekuatannya.

Secara dramatis, Soeharto melesat dengan memperkenalkan orde politiknya yang baru, yang menjadi anti-tesis orde dan pengaruh politik Soekarno. Dengan demikian, munculah kebijakan untuk mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 september. Kebijakan tersebut bersambut dengan aksi-aksi penangkapan terhadap kader, anggota dan simpatisan PKI beserta keluarganya. Laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak dari keluarga yang dituduh komunis, serta yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan PKI menjadi sasaran aksi-aksi tersebut.

Tahun 1967 yang merupakan pemberangkatan pertama ribuan tapol diberangkatkan dan diasingkan ke sana, kemudian tahun 1969 menyusul tapol lainnya, mereka disebar di berbagai titik di Pulau Buru. Di bawah pengawasan tentara, para tapol dipekerjakan untuk membuat lahan pertanian hingga irigasinya dengan cara membabat hutan, padang rumput, rawa agar bisa ditanami, selain itu tapol dipekerjakan membangun sarana fasilitas pemerintah maupun masyarakat, pada intinya di Pulau Buru dimanfaatkan untuk pembangunan di sana. Para tapol bekerja tanpa mengenal libur, mereka membangun fasilitas sendiri untuk fasilitas mereka. tapol yang bekerja di bawah pengawasan tentara, mereka mengikuti apa yang di perintah oleh tentara, jika tidak mengikuti perintah mereka akan mendapatkan sanksi. Sekitar tahun 1973 para tapol Pulau Buru mulai diberikan kebebasan untuk kehidupan mereka. Kebebasan tersebut berupa kelayakan hidup sebagai masyarakat pada umumnya dalam lingkungan tahanan Pulau Buru. Wartawan juga mulai diberikan izin untuk melakukan peliputan di sana. Dalam perkembangannya kehidupan tapol mulai bebas memanfaatkan dan menggunakan hasil pembangunan yang mereka kerjakan.

Metode Penelitian

Dalam karya ini penulis menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis ini menuntut penulis untuk bersikap kritis dari awal hingga akhir penelitian agar menghasilkan karya yang *kredibel*.² Metode sejarah kritis sendiri mempunyai tahap-tahap yang sama dengan metode penelitian sejarah pada umumnya. Suhartono menjelaskan bahwa terdapat empat tahap dalam penelitian sejarah, yaitu mengumpulkan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), intrepetasi (analisis, sintesis), dan eksposisi (historiografi).³ Sumber sejarah yang digunakan dalam skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para mantan tahanan politik yang pada masa Orde Baru diasingkan di Pulau Buru, selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap keluarga para tahanan politik yang ikut dikirim ke Pulau Buru. Adapun untuk sumber-sumber arsip, peneliti cukup beruntung memperoleh banyak berkas-berkas dan tulisan-tulisan dari mantan tapol yang didapatkan sekaligus dari narasumber yang peneliti wawancarai. Sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan artikel yang mendukung tema penelitian

Pembahasan

Penangkapan terhadap simpatisan PKI tersebut terjadi sekitar dua atau tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer yang dilakukan oleh kelompok Gerakan 30 September di Lubang Buaya. Penangkapan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya merembet ke Jawa Timur, Pulau Bali kemudian di sejumlah daerah di luar Jawa. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya, ribuan perwira dan personel lain ditahan, dibebaskan tugaskan dan

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, nomor 341/SKLBH/IV/2005, hlm. 6.

² Djumarwan, "Relevansi Metodologi antara Ilmu Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial", *Jurnal Informasi No.2 Th. XXII, Mei 1994*, hlm. 2.

³ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.150-155.

dipecat. Penumpasan PKI dan sekutunya, penindasan pergerakan rakyat, pembersihan secara sapu rata aparat negara, dan disingkirnya presiden Soekarno sebagai kekuatan politik efektif, semuanya dicapai antara bulan oktober 1965 dan bulan april 1966. Komunisme digambarkan sebagai bahaya kekuatan jahat yang tersembunyi yang patut diwaspadai, bahaya komunisme ini merupakan wacana politik paling penting dari retorika Orde Baru. Elemen-elemen yang dianggap pro-PKI dan harus segera ditumpas. semua yang berbau revolusi kiri, terlebih para mereka yang dianggap sebagai dalang peristiwa kader maupun simpatisan PKI. Akibatnya banyak kesenjangan sosial terjadi dan dalam perkembangannya keadaan ini dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk menghukum masyarakat lain yang kurang disukai di lingkungan sosialnya dengan menudingnya sebagai PKI. Mereka yang ditangkap, kemudian digiring ke kamp-kamp tahanan, sebagian diberangkatkan ke pulau Buru, Maluku.

Dalam kasus penangkapan dan pengasingan yang terjadi pada massa Orde Baru melibatkan mereka yang bukan hanya simpatisan PKI, perkembangannya lebih menunjukkan para korban. Korban sendiri merupakan mereka berada pada massa pergolakan sosial yang diakibatkan oleh tiga hal yaitu "gerakan", "peristiwa", dan "institusi" yang telah melebur menjadi satu, satu dalam tiga, dan tiga dalam satu. Para tahanan politik dari berbagai daerah di Jawa dikumpulkan menjadi satu di penjara Nusa Kambangan. Nusa Kambangan merupakan delta diantara Jawa barat dan Jawa tengah, tempat penjahat kelas berat dipenjarakan sejak jaman kolonial. Tempat ini merupakan tempat yang digunakan sebagai pelabuhan transit sebelum pemberangkatan tapol ke pulau Buru secara bertahap. Untuk menuju pulau Buru membutuhkan waktu perjalanan dan penderitaan yang cukup panjang. Tahanan politik diberangkatkan ke pulau Buru melalui jalur laut, pemberangkatan dimulai dari laut selatan (Samudra Hindia) dengan kapal milik tentara bernama ADRI XV. Tahanan politik disebar di pulau Buru tepatnya di daerah lembah sungai apu, yang telah dibangun unit-unit untuk permukiman para tapol. Di bawah pengawasan tentara, para tapol bekerja. Setiap barak yang berisi dua ratus tapol, dipilih salah satu kepala barak yang bertugas mengkoordinasi tapol lain dalam pembagian tugas. Sebelum dan sesudah bekerja mereka diharuskan mengikuti apel yang dipimpin oleh komandan pasukan dari batalyon tentara. Selama di sana para tapol mendapatkan masa rehabilitasi selama delapan bulan.

Dalam masa rehabilitasi, para tapol mendapatkan pasokan logistik dari pemerintah. Tahun demi tahun dijalani para tapol, pembangunan fisik sosial ekonomi pulau Buru dilakukan oleh para tapol. Unit-unit yang tadinya terdiri dari barak-barak dirubah menjadi pemukiman para tapol lengkap dengan segala fasilitasnya. Sampai tahun 1973 telah menyusul 309 orang istri dan 567 anak. Mereka bebas mengerjakan sesuatu sebagaimana keahliannya masing-masing serta bebas hidup bersosial seperti pada umumnya.

Dengan berbagai tekanan, mulai tekanan mental maupun fisik selama bekerja di pulau Buru. Tekanan-tekanan yang dialami oleh para tapol tersebut juga berdampak pada persepsi mereka tentang kebencian terhadap penguasa saat itu. Dalam keadaan yang serba kekurangan, para tapol terpaksa menjadi orang-orang yang harus mampu menciptakan apapun guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai dari mengolah makanan, hingga melindungi tubuhnya. Selama berada di pengasingan pulau Buru para tapol benar-benar berada jauh pada kehidupan sosial pada umumnya. Dalam perkembangannya, timbul persepsi yang seragam antara sesama tapol terhadap pemerintahan pada massa itu.

Kesimpulan

Penumpasan PKI dan sekutunya, penindasan pergerakan rakyat, pembersihan secara sapu rata aparat negara, dan disingkirnya presiden Soekarno sebagai kekuatan politik efektif, semuanya dicapai antara bulan oktober 1965 dan bulan april 1966. Mereka yang ditangkap, kemudian digiring ke kamp-kamp tahanan, sebagian diberangkatkan ke pulau Buru, Maluku. Dalam kasus penangkapan dan pengasingan yang terjadi pada massa Orde Baru melibatkan mereka yang bukan hanya simpatisan PKI, perkembangannya lebih menunjukkan para korban. Tempat ini merupakan tempat yang digunakan sebagai pelabuhan transit sebelum pemberangkatan tapol ke pulau Buru secara bertahap. Untuk menuju pulau Buru membutuhkan waktu perjalanan dan penderitaan yang cukup panjang.

Tahanan politik diberangkatkan ke pulau Buru melalui jalur laut, pemberangkatan dimulai dari laut selatan (Samudra Hindia) dengan kapal milik tentara bernama ADRI XV.

Tahanan politik tersebar di pulau Buru tepatnya di daerah lembah sungai apu, yang telah dibangun unit-unit untuk permukiman para tapol. Di bawah pengawasan tentara, para tapol bekerja. Setiap barak yang berisi dua ratus tapol, dipilih salah satu kepala barak yang bertugas mengkoordinasi tapol lain dalam pembagian tugas. Pengawasan yang ketat terhadap tapol selama di pulau Buru menimbulkan berbagai tekanan dan berakibat pada mental dan fisik mereka, juga berdampak pada psikologi, kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad Habib, (2004). *Konflik antar Etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Amos Sukamto, (2013). *Ketegangan Antar kelompok Agama Pada masa Orde Lama sampai Orde baru*. Jakarta: jurnal Teologi Republik Indonesia.
- Aswi Warman, (2006). *Soeharto: Sisi Gelap Soeharto*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Ombak
- Daliman, (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Daniel Dhakidae, (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eka Kurniawan, (2006). *Pramoediya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto, (2000). *Kekuasaan Otoriter, dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Homogeni*. Yogyakarta: INSIST.
- Helius Sjamsuddin, (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud Drijen pendidikan tinggi.
- Hesri Setiawan, (2003). *Kamus Gestok*, Yogyakarta: Galang Press.
- Hugiono & P.K. Purwanto, (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jurusan Pendidikan Sejarah, (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Kuntowijoyo, (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*, cet. Ke-4. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Listiono Santoso, (2006). *Epistemologi Kiri*, cet. Ke-4. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Pramoediya Ananta Toer, (1995). *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu: Catatan-catatan dari Pulau Buru*, cet. Ke-5. Jakarta: Lentera.
- Sardiman AM, (2004). *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Suhartono W. Pranoto, (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulami, (1991). *Perempuan-Perempuan dan Penjara, Kisah Nyata Para Wanita yang Dipenjara 20 Tahun karena Tuduhan MAKAR dan SUBVEERSI*. Jakarta: Cipta Lestari
- Utah Perlindungan, (2007). *Genjer-genjer, kuasa dan kontestasi makna*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintah Fisipol UGM.
- Wijaya Herlambang, (2013). *Kekerasan budaya pasca 1965*, Tangerang: CV Marjin Kiri.
- Yus Arianto, (2000). G30S: "Kontroversi Sebuah Tragedi", Jakarta: Forum.

Majalah, Surat Kabar dan Internet.

- KTS, "Pencatat yang Handal", *Soera kita no. 02*, 18 Desember 2001. Hlm.20.
- WAW, "Eks Tapol PKI Memutarbalikan Sejarah", *Tempo*, 7 Juni 1999, hlm. 28.
- Wikipedia. (2013). *Pulau Buru. Penjelasan tentang Pulau Buru* dilihat pada, www.pulau-buru-wikipediabahasaindonesia.ensiklopediabebas.com. Diakses pada tanggal 5 november 2013, pada pukul 20.45 WIB

Jurnal.

- Djumarwan, "Relevansi Metodologi Antara Ilmu Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial", *Jurnal Informasi No. 2 Th. XXII, Mei 1994*.

Baskara T. Wardaya SJ, *Rekonstruksi dan Refleksi Tragedi '65'*, Pusat Sejarah dan Etika Politik, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Front Anti Komunis Nasional, *Register Perkara No. 75/PDTG/2005/PNJKPst*, 9 Maret 2005

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Perbaikan Gugatan Perwakilan Kelompok (class Action)-Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Nomor: 75Pdt/G/2005/PN.JKT.PST.341/SK/LBH/IV/2005*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengiriman Salinan Putusan, Jakarta, 073.011-017/PAN.MK/2/2004*.

Surat William Oltmans kepada presiden Indonesia Soeharto pada 1 Oktober 1995, Amsterdam.

Skripsi

Khairul Anam, (2006). "Pembalasan Terhadap PKI di Jembrana (1965-1966)", Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Muhammad Irsyad Ibad, (2008). "Dinamika Identitas Sosial Masyarakat Eksponen Patrai Komunis Indonesia (PKI)", Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Reviewer

Yogyakarta, Mei 2016

Pembimbing

Zulkarnain, M. Pd
NIP. 19740809 200812 1 001

Terry Irenewaty, M. Hum
NIP. 19560428 198203 2 003